



# ADIL

# JURNAL HUKUM

**Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penanggulangan Kemiskinan**

*Soenyono (Universitas Wisnuwardana Malang)*

**Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen di Indonesia**

*Yusuf Shofie (Universitas YARSI)*

**Kontrak Standar Pengembang Perumahan dan Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Perlindungan Konsumen di Kota Makassar**

*Rusdin Alauddin (Universitas Khairun Ternate)*

**Perspektif Sosiologis atas Hukum (Kajian Terhadap Peran Pranata Sosial dalam Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat)**

*Endang Purwaningsih (Universitas YARSI)*

**Penegakan Hukum sebagai Wujud Pelayanan Pencari Keadilan**

*Moh. Muhibin (Universitas Islam Malang)*

**Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

*Nelly Ulfah Anisa Riza (Universitas YARSI)*

**Upaya Mediasi yang Dilakukan sebelum Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan**

*Syafrida (Universitas Tama Jagakarsa)*

**Penggunaan Bendera Negara sebagai Identitas Nasional Menurut Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia**

*Evie Rachmawati Nur Ariyanti (Universitas YARSI)*

**ADIL Jurnal Hukum** adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas YARSI tiga kali setahun pada bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal ini utamanya menerima tulisan asli laporan hasil penelitian hukum baik bersifat normatif maupun empiris. Setiap tulisan akan dinilai terlebih dahulu oleh mitra bestari yang merupakan ahli dalam bidang hukum. Substansi dalam artikel yang dimuat jurnal ini merupakan tanggung jawab ilmiah para penulis. Redaksi berhak mengedit naskah tanpa mengurangi makna tiap tulisan.

---

**Penanggungjawab**

Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H, M.Hum

**Ketua Penyunting**

Nelly Ulfah Anisa Riza, SH.MH

**Wakil Ketua Penyunting**

Liza Evita, S.H., M.Hum

**Penyunting Pelaksana**

Nurul Fajri Chikmawati, S.H., M.H.

Evie Rachmawati Nur Ariyanti, S.H., M.H

**Pelaksana Tata Usaha**

Arifin, S. H. dan Staf

**Alamat Redaksi/Penerbit**

Fakultas Hukum Universitas YARSI

YARSI Tower Building Lt.3

Jl. Letjend Suprapto Cempaka Putih

Jakarta Pusat 10510

Telepon/fax 021-4269288

(isi di luar tanggung jawab penerbit)

DAFTAR ISI

Halaman

**Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penanggulangan Kemiskinan**

*Soenyono (Universitas Wisnuwardana Malang)*

1

**Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen di Indonesia**

*Yusuf Shofie (Universitas YARSI)*

11

**Kontrak Standar Pengembang Perumahan dan Pemenuhan Hak-Hak**

**Konsumen dalam Perlindungan Konsumen di Kota Makassar**

*Rusdin Alauddin (Universitas Khairun Ternate)*

31

**Perspektif Sosiologis atas Hukum (Kajian Terhadap Peran Pranata Sosial dalam Penegakan Hukum dan Ketertiban Masyarakat)**

*Endang Purwaningsih (Universitas YARSI)*

50

**Penegakan Hukum sebagai Wujud Pelayanan Pencari Keadilan**

*Moh. Muhibin (Universitas Islam Malang)*

64

**Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

*Nelly Ulfah Anisa Riza (Universitas YARSI)*

75

**Upaya Mediasi yang Dilakukan sebelum Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan**

*Syafrida (Universitas Tama Jagakarsa)*

89

**Penggunaan Bendera Negara sebagai Identitas Nasional Menurut Peraturan**

**Perundang-Undangandi Indonesia**

*Evie Rachmawati Nur Ariyanti (Universitas YARSI)*

97

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SOENYONO

Guru Besar Universitas Wisnuwardana Malang

### ABSTRACT

*Poverty alleviation, if not backed up with promoting legal awareness, will be in vain. Gaining independence in the economic sector should go hand in hand with the promotion of legal awareness and the utilization of local potentials, emphasizing on the accelerated economic growth and the opening of more job opportunities, which directly decrease both poverty and crime rate. This research is using normative-empiric method with sociological approach. The fluctuation and the high unemployment rate in Indonesia require a pro-poor strategy. It has been proven that local-community-based economic development could remarkably demonstrate its impressive resilience during crisis, and it is therefore worth implementing. Poverty alleviation and the lower crime rate are interrelated because promoting legal awareness is only possible if the people could fulfill their economic needs.*

*Keywords:* Legal Awareness, Poverty, Community

### PENDAHULUAN

Dinamika hukum, politik dan ekonomi di Indonesia pada 5 tahun terakhir, telah membawa 30 Propinsi dan sekitar 342 Kabupaten /Kota pada proses Desentralisasi dengan UU No 32 Tahun 2004 sebagai pijakannya. Seiring dengan ini, telah terjadi pula perubahan kebijakan di bidang fiskal dengan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan ini, meskipun telah memperluas ruang partisipasi publik di Daerah dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan dan penganggaran, namun dalam tataran mewujudkan kualitas kehidupan yang layak dan berkelanjutan

belum bisa dikatakan berhasil dan memuaskan.

Penanda lain yang terkait dengan kualitas kehidupan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Gender (Gender Related Development Indeks), Indonesia berada pada urutan 90 dari 144 Negara. Bahkan rangking GDI ini Indonesia berada dibawah Negara-Negara tentangga, seperti Malaysia pada rangking 52, kemudian Thailand, Filipina, dan Vietnam masing-masing berada pada rangking ke-61, ke-66 dan ke-87 (UNDP, 2004). Ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dicapai Indonesia dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

**PENEGAKAN HUKUM  
SEBAGAI WUJUD PELAYANAN PENCARI KEADILAN**

Moh. Muhibbin

Dosen FH Universitas Islam Malang

**Abstract**

*The paradigm in law enforcement essentially refers to legal certainty in which community members are provided with sound legal services in time they need one. This research comes in the form of literature study, which is a part of judicial normative study. The findings suggest that law enforcement does not only refer to the implementation of the existing laws but also indicate how successful a country carries out its administration tasks in line with national development programs. The key factor in law enforcement lies in the quality of human resources, i.e. people's legal awareness. This factor, which plays a significant role in having the law supremacy achieved, should be improved to uphold the supremacy of law.*

**Keywords:** law enforcement, law, justice

**PENDAHULUAN**

Konstruksi hukum dibentuk melalui proses yang demokratis sebagai landasan berpijak bagi penyelenggaraan negara dalam arti luas sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.. Hukum harus di dasarkan pada nilai-nilai keadilan, menghormati hak-hak asasi manusia secara universal yang saat ini mengalami degradasi. Dengan penegakan hukum yang "intens" dan membangun komitmen bersama yang kuat, kita bisa berharap bahwa masa depan hukum kita bisa berdiri tegak dan membawa "good government" dan "good governance", sebuah pemerintahan yang bersih dan dibatasi oleh hukum yang menghormati hak dan kewajiban warga negaranya, bukan hanya kepentingan dan keinginan orang yang berada di dalamnya.

Perkembangan hukum menunjukkan bahwa kita memiliki undang-undang yang relatif lebih baik dan lebih kuat bagi kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Sehingga penegakan hukum tidak hanya sebagai wacana saja akan tetapi juga di implementasikan secara utuh dan menyeluruh ditingkatkan daerah maupun pusat. Oleh sebab itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberi rasa keadilan pada masyarakat.

Penegakan hukum yang sesuai dengan harapan merupakan bagian dari tuntutan peradaban, sehingga menegakkan hukum dengan baik, bukan saja cermin peradaban tetapi merupakan proses menumbuhkan peradaban. Tugas penegak hukum adalah berusaha sekuat kuatnya memenuhi harapan dan tuntutan tersebut sebagai perwujudan